

111

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 37

TAHUN 2007

Ributnya pengaturan perdagangan timah memang patut kita pahami. Gemerincing uang dalam bisnis ini begitu nyaring. Realisasi penerimaan negara dari royalti pertambangan tahun 2006 mencapai Rp 6,4 triliun. Data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari penambangan timah di Provinsi "Serumpun Sebalai" alias Bangka Belitung (Babel). Dari perolehan sebanyak itu, 20% men-

Gurahnya Timah Serumpun Sebalai

jadi jatah pemerintah pusat, 16% jatah pemerintah provinsi, 32% bagian pemerintah kabupaten, dan sisanya untuk daerah lain.

Indonesia memang produsen timah terbesar kedua setelah China yang memasok 31,1% kebutuhan dunia. Data dari International Tin Research Institute (ITRI) menyatakan

total produksi timah asal Indonesia 90.000 ton, dengan asumsi pasokan dari PT Timah 50.000 ton, sekitar 15.000 ton dari Koba Tin, dan 25.000 ton dari smelter swasta lainnya.

Kini, harga timah sedang tinggi-tinggi. Per 19 Juni 2007, harga timah di London Metal Exchange

mencapai US\$ 14.170 per ton atau Rp 127,5 juta per ton. Buntutnya, penyelundupan timah pun merebak. Soalnya, harga timah di pasar lokal tak ikut meroket. PT Timah, misalnya, hanya melabeli harga kulakan biji timah Rp 59.000 per kilogram.

Sebetulnya, tanpa perlu mem-

bandingkan dengan harga internasional pun bisnis timah sudah mampu membuat banyak pihak ngiler. Kepolisian Daerah Babel menyisir paling tidak ada sekitar 8.000 titik penambangan. Jangankan dari lokasi penambangan resmi, mengais sisa pasir timah di bekas galian perusahaan tambang pun hasilnya cukup sedap. Anda bisa menjemput tiga sampai lima kilogram pasir timah per hari yang laku dijual Rp 200.000-an. Gurih, kan?

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 37

TAHUN 2007

Aturan Dagang Bijih Timah malah Bikin Susah

Para penambang Bangka Belitung menolak aturan perdagangan bijih timah antarpulau

Provinsi Bangka Belitung menolak peraturan Mendag soal perdagangan bijih timah antarpulau. Mereka merasa aturan itu bakal merugikan daerah mereka. Pemerintah menganggapnya melindungi timah setempat.

Arief Ardiansyah

Ruang sidang DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan menjadi saksi berpadunya pendapat semua elemen pertambangan timah setempat. Senin pekan depan, mereka akan *koor* menolak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perdagangan Bijih Timah Antar Pulau. "Semua komponen sepakat tak sependapat dengan aturan tersebut," kata Usman Saleh, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Babel.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu telah meneken peraturan itu sejak 30 April silam dan se-

harusnya mulai berlaku pada akhir Juni nanti. Intinya, aturan ini merupakan pedoman perdagangan bijih timah antarpulau yang selama ini belum ada aturannya. "Fungsinya untuk perlindungan. Kami minimalkan agar pergerakan bijih timah terpantau," kata Gunaryo, Direktur Bina Pasar dan Distribusi Departemen Perdagangan. Tentu aturan itu terbilang ketat berikut sanksinya. Namun, begitu terbit, beleid baru ini langsung menjadi bahan perdebatan seru hingga berujung pada sidang DPRD pekan depan. Resno Astanto, Ketua Asosiasi Tambang Timah Rakyat (Astira) yang telah menerima undangan dari DPRD untuk menghadiri sidang itu, mengaku tak bisa menerima peraturan baru itu. Pengaturan perdagangan bijih timah antarpulau menurutnya justru akan merugikan banyak pihak. Mereka khawatir bakal banyak terjadi penyelundupan.

Alasan lain penolakan Usman

cukup simpel, dia merasa daerahnya bakal rugi gara-gara aturan ini. Seperti kita tahu, Provinsi Babel adalah penghasil timah terbesar di Indonesia. Paling tidak, ada lima sentra pertambangan yang berada di lima kabupaten, yaitu Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Induk, dan Belitung Timur. "Tak sejengkal tanah, baik di darat atau di laut, Bangka yang tidak mengandung timah," katanya.

Dia yakin, aturan baru itu secara tidak langsung akan menghilangkan kesempatan kerja dan berusaha masyarakat Babel. Timah Babel dikeruk, tapi tak ada industri hilir di sana yang menghasilkan timah batangan. Selain itu, pemerintah daerah juga ke-

hilangan potensi pendapatan berupa bagi hasil dari royalti 3% dan nilai ekspor timah batangan yang diproduksi di sana.

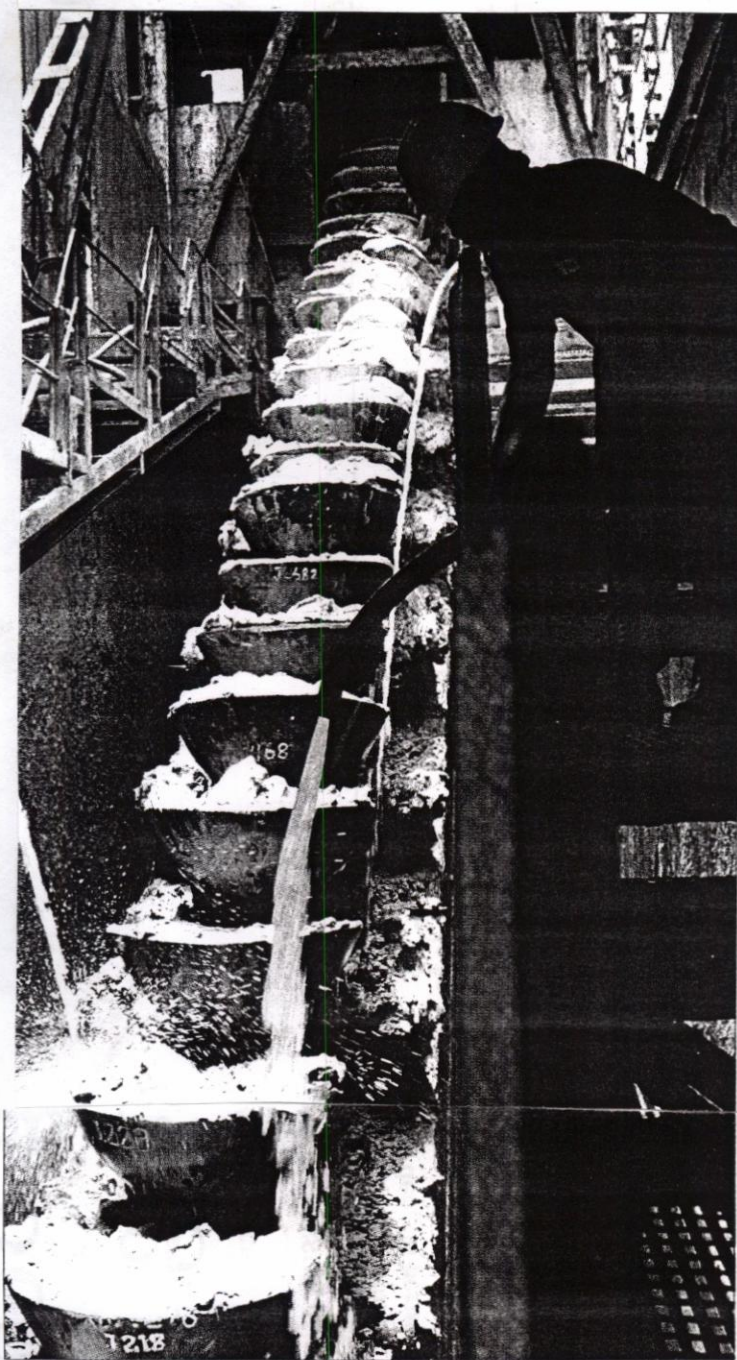
Belum lagi kerugian Babel akibat kerusakan lingkungan. Dalam hitungan Usman, bila banyak daerah lain membangun pabrik peleburan bijih timah menjadi balok timah (*smelter*), lingkungan Babel akan lebih cepat rusak.

Untuk itu, Usman malah gan mengusulkan kepada pemerintah agar melokalisasi produksi timah hanya di wilayah Babel. Perdagangan antarpulau hanya boleh terjadi untuk timah batangan. "Daripada Surabaya atau Bante bikin *smelter*, lebih baik mereka beli timah batangan saja dari sini," katanya.

Ini pedoman, bukan sekadar aturan

Patut kalau para penambang berang membaca aturan baru ini

Perusahaan yang mendapat sanksi terberat berarti haram menjual bijih timah ke luar pulau asal timah.



REUTERS/Beawiharta

Tak sejengkal pun tanah, baik di darat maupun laut, Bangka yang tidak mengandung timah.

Soalnya, mereka tak kan gampang menjual bijih timah ke luar Bangka. Asal tahu saja, bila aturan baru itu kelak berlaku, bijih timah hanya bisa meluncur dari Babel bila disertai Surat Persetujuan Perda-

gangan Bijih Timah Antar-Pulau (SPPBAP) dari Kepala Dinas Perdagangan asal bijih timah. Surat yang hanya berlaku untuk sekali pengiriman ini harus memuat keterangan mengenai jumlah bijih

timah, daerah asal, daerah tujuan, nama pemegang Kontrak Karya (KK) atau pemegang KP Eksploitasi (KPE), serta KP Pengolahan dan Pemurnian (KPP).

Setelah itu, ada kewajiban bagi pemegang KK dan KPE untuk menyampaikan Surat Bukti Kedatangan Bijih Timah (SBKBT) kepada Kepala Dinas Perdagangan daerah asal bijih yang isinya merupakan tanda terima dari Kepala Dinas Perdagangan kabupaten-kota daerah tujuan. Mereka juga harus menyusun laporan realisasi perdagangan bijih timah kepada pemerintah pusat dan daerah.

Peraturan ini juga menyiapkan sanksi buat para pelanggar, baik pemegang KK, KPE, dan KPPP: dari sekadar peringatan keras tertulis sampai masuknya mereka ke dalam daftar hitam perusahaan. Perusahaan yang mendapat sanksi terberat tak lagi bisa memperoleh SPPBAP. Itu berarti diharamkan menjual bijih timah ke luar pulau. "Permendag ini sebenarnya pedoman untuk perdagangan bijih timah antarpulau. Kalau tidak ada, kan, enggak ada larangannya," kata Gunaryo.

Menurut dia, beleid ini sesungguhnya justru merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat atas potensi timah di Babel. Tanpa aturan ini, penyelundupan bijih timah menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Itu sebabnya, dia menilai penolakan muncul lantaran masyarakat setempat tak paham benar pada sisi peraturan Mendag itu. "Peraturan ini nyaris merupakan replikasi dari aturan tentang perdagangan antarpulau untuk produk lain seperti kayu dan gula, kok," katanya.

Boleh jadi Gunaryo benar. Soalnya, baik Usman maupun Resno sama-sama mengaku tak sekali pun diajak bicara oleh Depdag perihal penerbitan peraturan ini. "Padahal, waktu pembuatan aturan perdagangan gula, saya sempat dua kali diajak bicara," katanya.

Sekadar salah paham tentu bisa diluruskan. Tapi, kalau penolakan muncul didasari kekecewaan perusahaan tambang yang tak lagi leluasa menjual timah kepada siapa saja, ini bakal seru. □

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2007

Keppres No. 32/90 ganjal gambut untuk energi

Oleh ISMAIL FAHMI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemanfaatan lahan gambut untuk sumber energi baru terganjal oleh Keppres No. 32/1990 tentang Kawasan Hutan Lindung.

Ganjalan peraturan tersebut dimungkinkan, karena sebagian besar dari total lahan gambut di Indonesia—yang mencapai 26 juta ha—berada di kawasan hutan lindung.

"Padahal sekitar 30% atau 7,855 juta hektare dari total lahan gambut tadi memenuhi syarat untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi baru," ujar Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan PT Energi Manajemen Indonersia (Persero) Dicky Edwin Hindarto kemarin.

Pemenuhan syarat tersebut, menurut dia, antara lain memiliki ketebalan lebih dari 2 meter. "Kalau Keppres No.32/1990 bisa direvisi, maka lahan gambut bisa menjadi energi alternatif untuk mengatasi permintaan bahan bakar nasional yang terus meningkat."

PT Energi Manajemen Indonesia mencatat kebutuhan energi di Indonesia tiap tahun meningkat 7%-8%.

Potensi lahan gambut untuk sumber energi

Lokasi	Luas
Sumatera	4,748 juta
Kalimantan	3,107 juta
Total	7,855 juta

Sumber: Dep. ESDM

Tingginya kebutuhan energi ini umumnya dipenuhi oleh minyak bumi, gas alam dan batu bara. Namun oleh sifatnya yang tidak terbarukan, sumber bahan bakar ini suatu saat akan habis.

"Untuk tetap menjamin pasokan energi yang cukup di masa depan, perlu dipersiapkan sejak dini sumber-sumber energi alternatif, di antaranya energi terbarukan dan gambut," papar Dicky.

Dia menepis anggapan bahwa pengembangan lahan gambut dapat merusak lingkungan. Kemajuan teknologi eksplorasi dan eksploitasi sum-

ber energi, katanya, membuat berbagai dampak lingkungan dapat dikurangi.

"[Berkat kemajuan teknologi] Sekarang ini lahan bekas tambang dapat direklamasi dengan baik dan benar, sehingga fungsi-fungsi lingkungan dapat dikembalikan secara maksimal."

Lahan terluas

Sementara itu, Hasil penelitian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan total lahan gambut nasional yang mencapai 26 juta ha menempatkan Indonesia sebagai negara pembudidaya gambut terluas keempat di dunia setelah Kanada, Rusia dan Amerika Serikat.

Lahan gambut tersebut tersebar di Sumatera (Nanggroe Aceh Darussalam, Sumut, Riau, Jambi dan Sumsel) dan Kalimantan (Kalbar, Kalteng dan Kaltim)

Kandungan kalori gambut di Indonesia, menurut hasil penelitian tadi, berkisar 4.000 kalori-5.500 kalori/gram dengan tebal 5 meter-13 meter. Sedangkan kandungan abunya 2,13%-4,19% dan kandungan sulfur 0,27%-0,63%.

Menyadari potensinya yang cukup besar tersebut, Departemen ESDM telah lama menetapkan gambut sebagai bahan galian golongan B (vital).

Dicky berpendapat untuk mengoptimalkan manfaat gambut agar bernilai ekonomi tinggi.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 5

TAHUN 2007

Antam olah nikel di luar negeri

BISNIS INDONESIA

JAKARTA : PT Aneka Tambang (Antam) Tbk kemungkinan akan melakukan pengolahan nikel di luar negeri, menyusul terjadinya kerusakan di pabrik feronikel (FeNi) III pada akhir pekan lalu.

Development Director Antam Darma Ambiar menjelaskan pengolahan nikel di luar negeri (*tooling*) merupakan salah satu opsi yang akan ditempuh oleh Antam agar produksi nikel tetap sesuai target pada tahun ini.

"Sejauh ini kami telah menjajaki kerja sama dengan Jepang, yaitu dengan Pacific Metal Company untuk melakukan pengolahan itu. Namun karena perusahaan itu sedang melakukan perbaikan dan kapasitas pengolahannya sudah penuh, maka kami masih

mencari yang lainnya," kata dia di Jakarta kemarin.

Negara lain selain Jepang yang dijajaki Antam untuk pengolahan nikel adalah Ukraina yang juga menjadi salah satu mitra Antam.

Menurut Direktur Operasi PT Antam Alwin Syah Loebis, dengan *tooling* itu, tingkat produksi nikel Antam bisa dijaga.

"Itu memang akan kami tempuh, untuk menjaga tingkat produksi kami."

Dia menjelaskan, harga pengolahan di luar negeri tidak jauh beda dengan pengolahan di dalam negeri. Saat ini, harga pengolahan nikel di Indonesia mencapai US\$4,86 per pond.

"Harganya sama. Bila diolah di dalam negeri, komponen yang menyebabkan biaya produksi menjadi mahal adalah

biaya listrik," ungkapnya

Hingga saat ini, Antam tengah melakukan perbaikan di pabrik FeNi III di Pomala, Sulawesi Tenggara.

Menurut jadwal, perbaikan pabrik akan memakan waktu setidaknya hingga tiga minggu sejak terjadinya kebocoran.

Sebelumnya, pabrik FeNi III mengalami kerusakan akibat terjadinya kebocoran kecil metal dinding tanur di sisi elektroda satu. Padahal, pabrik itu baru beroperasi dalam enam bulan.

Proyek FeNi III mulai beroperasi pada 29 Januari tahun ini, dan hingga Mei lalu pabrik tersebut telah menghasilkan 7.510 ton nikel.

Untuk pembangunan pabrik FeNi III, Antam menginvestasikan dana hingga US\$320 juta. (01)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

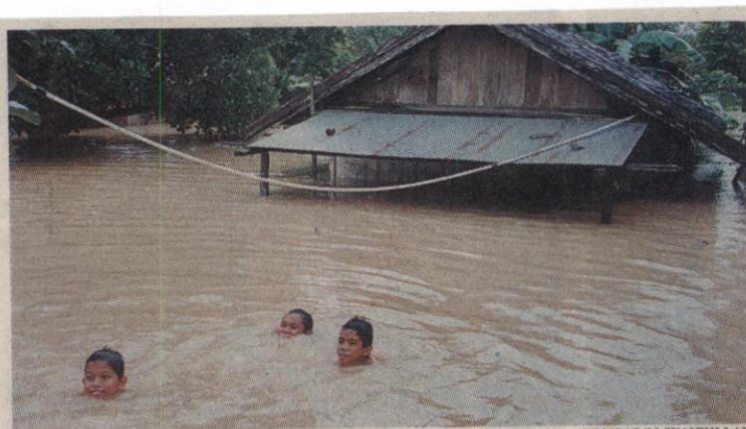
MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2007



KOMPAS/M SYAIFULLAH

Tiga bocah berenang di depan rumah warga di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kamis (14/6), yang terendam air setinggi 3 meter. Selain memaksa ratusan warga setempat untuk mengungsi, banjir ini juga melumpuhkan kegiatan pertambangan di beberapa kecamatan.

BANJIR DI PERTAMBANGAN

Lubang-lubang Besar Pembawa Bencana

Yani (35), warga Kintap, menatap air deras yang menggenangi jalan tambang di Asam-asam, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ia menghentikan sepeda motornya karena tidak mungkin menembus banjir setinggi 1 meter.

Oleh M SYAIFULLAH

Akibat banjir, lelaki bertubuh kurus itu tak bisa masuk ke hutan-hutan di kawasan pertambangan untuk mencari burung.

Meski sebenarnya warga dilarang keras memasuki areal tambang, Yani setiap hari kucing-kucingan masuk areal tambang. Lalu-lalang truk pengangkut batu bara tak dihiraukan.

Ia harus *mamulut* burung (menangkap burung menggunakan *pulut* atau lem khusus yang dioleskan pada lidi dan ditempatkan di pohon-pohon).

"Yang kutangkap itu burung tinjaw. Sehari bisa dapat satu ekor. Kalau dijual, laku Rp 60.000. Karena banjir, saya menganggur," kata Yani yang dijumpai saat banjir besar itu, beberapa waktu lalu.

Banjir akibat hujan berhari-hari itu tak hanya menyengsarakan Yani dan ribuan warga lain di Kabupaten Tanah Laut dan sejumlah daerah lain di Kalimantan Selatan (Kalsel). Banjir menggenangi lubang-lubang tambang sehingga kegiatan penambangan harus dihentikan. Dampak lainnya, produksi listrik terganggu.

Akibatnya, pasokan batu bara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-asam nyaris terhenti. Produksi listrik anjlok sehingga PLN Kalsel-Kalteng melakukan pemadaman bergilir.

Ini terjadi karena tiga perusahaan pemasok batu bara ke PLTU Asam-asam berhenti memproduksi sehingga tersisa satu pemasok.

Dalam pantauan *Kompas*, lubang-lubang tambang batu bara, yang biasanya ramai oleh kegiatan penambangan dan truk-truk pengangkut, kini lengang. Lubang-lubang tambang tampak menjadi kolam raksasa.

Bukan hanya areal pertambangan dari perusahaan kecil-kecil yang terendam air. Areal PT Arutmin Indonesia pun terendam. "Tetapi, kegiatan peng-

angkutan batu bara tetap berjalan karena hasil penambangan sebelum banjir masih banyak di penampungan," kata Wawan Kadarusman, Koordinator Hubungan Eksternal PT Arutmin Indonesia.

Maka, hanya Arutmin-lah yang masih bisa memasok batu bara ke PLTU Asam-asam.

Jika dalam sehari ada 5.000 ton batu bara tak terangkut, sementara harga batu bara Rp 260.000-Rp 450.000 per ton, maka kerugian akibat banjir mencapai Rp 1,3 miliar per hari. Ini belum termasuk kerugian untuk batu bara yang dikirim antarpulau atau ke luar negeri.

Tidak berpengaruh

Bagi para penambang, banjir yang hanya beberapa hari itu tidaklah berpengaruh banyak terhadap kegiatan usahanya. Sebab, kerugian itu bisa ditutup saat melakukan penambangan pada musim kering. Akan tetapi, banjir itu tetap memukul kehidupan warga setempat, apalagi hampir setiap tahun terjadi. Malah dalam satu musim hujan, banjir bisa berkali-kali melanda.

Nasib buruk akibat banjir di daerah-daerah tambang juga dialami ribuan warga di luar Jorong, Tanah Laut. Banjir secara bersamaan melanda banyak wilayah di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru.

Sebagian warga tidak sempat menyelamatkan harta benda akibat bah datang amat cepat dan dahsyat sehingga merobohkan dan merusak rumah-rumah warga. Tahun 2006, banjir menghancurkan empat jembatan, membuat jalan trans-Kali-

mantan di timur Kalsel terputus pada 17 tempat dan menghanyutkan sekitar 50 rumah.

Ribuan rumah terendam air setinggi satu hingga tiga meter karena sebagian besar penduduk tinggal di bantaran sungai. Permukiman di pinggiran jalan trans-Kalimantan juga dihantam gelombang terakhir sebelum air banjir mengalir ke Laut Jawa.

Potret buruk

Areal tambang yang terendam banjir itu sebenarnya merupakan daerah penyangga Pegunungan Meratus. Akan tetapi, kawasan hijau yang tersisa di Kalsel kini tampaknya tidak lagi mampu menahan curah hujan.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kalimantan Selatan Rahmadi Kurdi mengatakan, banjir di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru adalah potret buruk kerusakan lingkungan di Kalsel. "Banjir ini tidak bisa hanya dilihat sebagai banjir biasa," katanya.

Rahmadi mengungkapkan, tahun 1970-1980-an, daerah ini jadi ajang pesta penambangan kayu terbesar oleh para pemegang hak perusahaan hutan. Ketika pembalakan belum selesai, pertambangan batu bara, legal dan ilegal, mulai marak tahun 1985, termasuk di kawasan hutan.

Pesta penambangan memang nyaris usai. Akan tetapi, kini penambangan batu bara justru marak, kendati operasi penertiban dan penegakan hukum untuk penambangan ilegal gencar dilakukan. Akibatnya, masyarakat lokal yang kini harus menuai bencana.